



RENCANA KERJA
2025



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujoh Bilang, 20 Januari 2025

Kepala

**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu,**



Yohanes Andy Apen, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19730702 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan capaian	
Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja.....	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV P E N U T U P.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.Tahapan penyusunan RPJMD Kab. Mahakam Ulu 2021-2026.....	4
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Kab. Mahakam Ulu dan pencapaian renstra PD s/d tahun 2025 (tahun berjalan).....	9
Tabel 2.2. Analisis kinerja pelayanan PD.....	22
Tabel 3.3.1 Program kegiatan BPKAD Kab. Mahakam Ulu.....	39
Tabel 3.3.2 Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran TA.2025	42

Paraf Hierarkis	Paraf
Sekretaris	
Kasubbag Perencanaan Program	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Selama pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

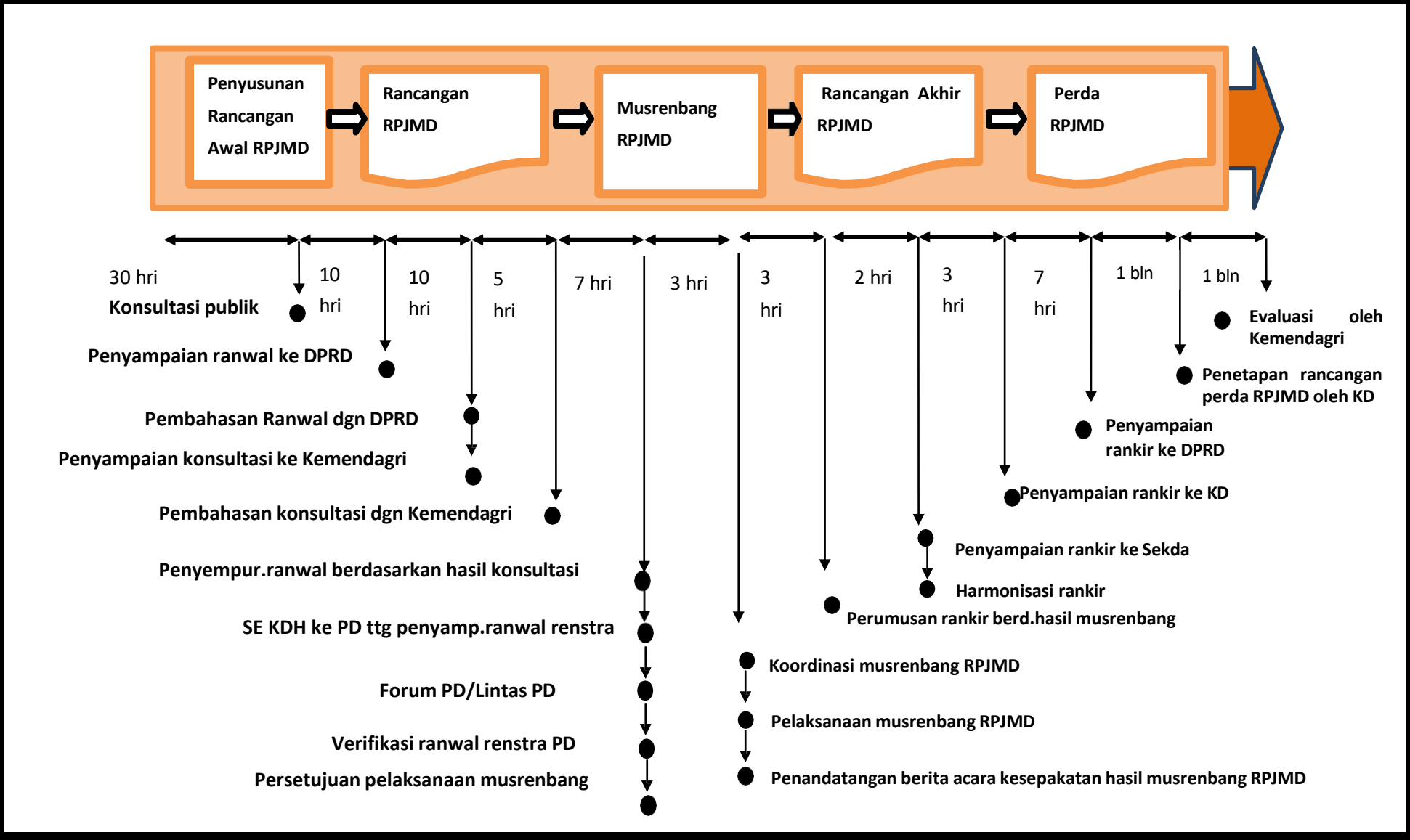
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan dengan demikian Renja BPKAD Tahun Anggaran 2025 akan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka tata cara dalam penyusunan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tata cara dan alur penyusunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan antara lain :

1. Renja disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini,

Tabel 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu



1.2

Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2005 -2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset-aset lingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

BPKAD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu

Tingkat efektifitas dan efiseinsi kinerja program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Tabel 2.1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	5.02	KEUANGAN						
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</i>	A Predikat Sakip 100 %	100% BB Predikat Sakip	100% BB Predikat Sakip	100 % BB Predikat Sakip	A Predikat Sakip 100 %
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	90 %	100% 12 Orang/Bulan	100% 12 Orang/Bulan	87 %	90 %
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	24 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Laporan	200%	2	2 Laporan	2 Laporan
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	90 %	100% 1 Laporan	100% 1 Laporan	80 %	90 %
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24/12 Orang/bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/bulan	24/12 Orang/bulan
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	3 Laporan
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	90 %	100%	100%	80 %	85 %
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	90 %	100%	100%	80 %	85 %
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	90 %	100%	100%	85 %	90 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	150 Unit	22 Unit	22 Unit	1 Unit	25 Unit
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit	85 Unit	85 Unit	1 Unit	1 Unit
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	18 Unit	55 Unit	55 Unit	1 Unit	3 Unit
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase SILPA terhadap APBD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Penetapan APBD Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	1 % 100 % 10 % WTP 0 % 100 %	WTP 100 10 1 % % %	WTP 100 10 1 % % %	0 % 10 % 100 % WTP	1 % 100 % 10 % WTP 0 % 100 %
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Tersusunya APBD</i>	90 %	100%	100%	100 %	80 %
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	174 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29 Dokumen
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	48 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	48 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	95 %	100%	100%	90 %	95 %
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	6 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	25 Orang
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	95 %	100%	100%	90 %	95 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	36 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	6 Laporan
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	102 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	2 Laporan	17 Laporan
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	90 %	100%	100%	85 %	90 %
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	6 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	90 %	100%	100%	80 %	85 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	25 Orang
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik</i> <i>Presentase Aset yang termanfaatkan</i> <i>Presentase Aset yang sudah dinilai</i> <i>Presentase penghapusan aset</i>	91 % 70 % 90 % 90 % 89 % 92 %	95 89 87 % % %	95 89 87 % % %	69 % 88 % 89 % 90 %	91 % 70 % 90 % 90 % 89 % 92 %
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	90 %	100%	100%	85 %	90 %
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2024	Target Program Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT,CFS (Critical Succes Factor).
2. RAD (Rapid Appication Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Politic Ekonomic,Social,Tech)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Sebagai mediator antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.

2.2.2 Weaknesses (Kelemahan), Internal

1. Penerbitan Peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya Lembaga/ Instansi yang masih memiliki sikap (egosektoral) dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) External

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitas SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai pasal 48 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab/ Kota disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi;
3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan Perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Treats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa purna tugas/ pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya regenerasi PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

3. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dihadapkan pada kondisi spesifik/riil daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Tabel 2.2.

[illegible]

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak
2. Belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit dalam melakukan koordinasi lebih cepat;
5. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait spesifikasi barang;
6. Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Tidak adanya regulasi yang mengatur pembagian tugas dan wewenang antara bidang Perusda BPKAD dengan Biro Perekonomian;
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset.
7. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKAD kepada masyarakat /publik maupun perangkat daerah lainnya.
8. Pembangunan Kantor BPKAD Prov.Kaltim untuk segera dapat diselesaikan, mengingat Kebutuhan Kantor sudah sangat mendesak dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada SKPD maupun masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKAD

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesajahteraan masyarakat.
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
2. **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
3. **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk Program kegiatan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 92.330.781.805,-** ,dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Belanja Pegawai | = Rp., 19.683.154.543,- |
| 2. | Belanja Barang/Jasa | = Rp. 62.520.686.513,- |
| 3. | Belanja Modal | = <u>Rp. 10.126.940.749,-</u> |
| | | Rp. 92.330.781.805,- |

Dari data data diatas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3.1 Program Kegiatan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87 %	190.808.669,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.860.174,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	59.053.031,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	69.895.464,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %	17.488.460.934,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	16.551.484.609,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	547.440.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	139.019.895,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	250.516.430,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	944.668.595,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	121.371.395,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.999.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.298.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	8.974.012.000,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	166.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	8.807.512.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	1.081.104.036,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	456.964.356,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	15.540.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	55.167.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	318.126.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	235.306.680,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0 % 10 % 100 % WTP	58.074.330.647,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	10.877.030.251,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	4 Dokumen	750.928.964,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	714.271.933,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	28 Dokumen	1.173.455.948,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	28 Dokumen	705.305.278,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	28 Dokumen	954.580.180,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	28 Dokumen	707.985.670,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1.255.147.131,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	1.388.728.093,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	642.542.012,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	629.632.662,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	826.085.060,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	204.388.391,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Orang	923.978.929,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	90 %	8.976.566.294,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1.577.860.130,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	478.615.282,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	316.821.470,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1.226.225.563,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	333.180.216,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	363.578.557,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1.310.927.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	484.786.464,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	753.608.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	261.872.112,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	1.869.091.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	90 %	5.185.137.296,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	275.565.387,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	558.651.490,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	849.580.232,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.318.638.016,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	179.988.582,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	211.911.524,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	328.375.266,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	203.191.290,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	549.246.876,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	709.988.633,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	85 %	32.668.427.040,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	32.668.427.040,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	80 %	367.169.766,00	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	367.169.766,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	85 %	26.912.362.546,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	4 Dokumen	1.610.106.160,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	18.168.552.035,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	372.747.880,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	370.009.745,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.629.440.180,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	431.576.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Lokasi Kegiatan
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	353.983.817,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.489.647.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	538.116.384,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	215.528.203,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Orang	732.654.142,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang
J U M L A H			113.665.747.427,00	

Tabel 3.3.3. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu
(dalam ribuan)

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</i>	A Predikat Sakip 100 %	100 % BB Predikat Sakip	28.679.054.234,00	A Predikat Sakip 100 %	30.727.193.334,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	90 %	87 %	190.808.669,00	90 %	169.708.272,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	61.860.174,00	2 Dokumen	61.136.797,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	24 Laporan	1 Laporan	59.053.031,00	4 Laporan	54.554.080,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Laporan	2 Laporan	69.895.464,00	2 Laporan	54.017.395,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	90 %	80 %	17.488.460.934,00	90 %	17.511.333.830,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24/12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	16.551.484.609,00	24/12 Orang/bulan	16.551.484.610,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	547.440.000,00	1 Dokumen	548.280.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 Laporan	1 Laporan	139.019.895,00	1 Laporan	140.010.030,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	4 Laporan	250.516.430,00	3 Laporan	271.559.190,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	90 %	80 %	944.668.595,00	85 %	2.754.791.670,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	0,00	1 Paket	45.729.890,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	0,00	1 Paket	965.303.941,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	121.371.395,00	1 Paket	343.080.441,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	0,00	1 Paket	207.187.118,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	6 Laporan	1 Laporan	22.999.200,00	1 Laporan	205.128.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6 Laporan	1 Laporan	800.298.000,00	1 Laporan	988.362.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	90 %	80 %	8.974.012.000,00	85 %	9.081.045.370,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	64.076.970,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	6 Laporan	1 Laporan	166.500.000,00	1 Laporan	176.490.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan	1 Laporan	8.807.512.000,00	1 Laporan	8.840.478.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	90 %	85 %	1.081.104.036,00	90 %	1.210.314.192,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 Unit	1 Unit	456.964.356,00	2 Unit	490.622.442,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	150 Unit	1 Unit	15.540.000,00	25 Unit	15.540.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit	1 Unit	55.167.000,00	1 Unit	63.048.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	18 Unit	1 Unit	318.126.000,00	3 Unit	539.103.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	1 Unit	235.306.680,00	1 Unit	102.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Penetapan APBD Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 % 100 % 10 % WTP 0 % 100 %	0 % 10 % 100 % WTP	58.074.330.647,00	1 % 100 % 10 % WTP 0 % 100 %	50.149.595.650,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Tersusunya APBD</i>	90 %	100 %	10.877.030.251,00	80 %	11.598.969.933,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	24 Dokumen	4 Dokumen	750.928.964,00	4 Dokumen	750.923.434,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	174 Dokumen	4 Dokumen	714.271.933,00	29 Dokumen	714.289.158,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	28 Dokumen	1.173.455.948,00	29 Dokumen	1.325.664.948,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	28 Dokumen	705.305.278,00	29 Dokumen	708.583.896,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	28 Dokumen	954.580.180,00	29 Dokumen	1.509.463.602,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	174 Dokumen	28 Dokumen	707.985.670,00	29 Dokumen	717.436.905,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	48 Dokumen	4 Dokumen	1.255.147.131,00	4 Dokumen	1.255.146.434,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	48 Dokumen	4 Dokumen	1.388.728.093,00	4 Dokumen	1.388.728.673,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	12 Dokumen	1 Dokumen	642.542.012,00	2 Dokumen	642.542.557,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	629.632.662,00	2 Dokumen	629.633.247,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	826.085.060,00	2 Dokumen	826.183.134,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>	12 Dokumen	2 Dokumen	204.388.391,00	2 Dokumen	204.388.545,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	25 Orang	923.978.929,00	25 Orang	925.985.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	95 %	90 %	8.976.566.294,00	95 %	9.012.066.578,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1.577.860.130,00	1 Dokumen	1.584.858.125,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	6 Laporan	1 Laporan	478.615.282,00	1 Laporan	478.617.504,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	316.821.470,00	1 Dokumen	342.574.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	1.226.225.563,00	1 Dokumen	1.226.225.745,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	333.180.216,00	1 Dokumen	333.245.475,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	363.578.557,00	1 Dokumen	364.629.367,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil</i>	6 Laporan	1 Laporan	1.310.927.000,00	1 Laporan	1.312.065.385,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>						
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	484.786.464,00	1 Dokumen	485.229.860,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	6 Dokumen	2 Dokumen	753.608.500,00	1 Dokumen	753.652.860,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	261.872.112,00	1 Dokumen	261.877.257,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	30 Orang	1.869.091.000,00	25 Orang	1.869.091.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	95 %	90 %	5.185.137.296,00	95 %	4.840.103.618,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	36 Laporan	1 Laporan	275.565.387,00	6 Laporan	275.565.768,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	12 Dokumen	1 Dokumen	558.651.490,00	2 Dokumen	213.511.928,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	102 Laporan	2 Laporan	849.580.232,00	17 Laporan	849.590.327,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	6 Laporan	1 Laporan	1.318.638.016,00	1 Laporan	1.318.638.085,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	6 Dokumen	2 Dokumen	179.988.582,00	1 Dokumen	180.011.297,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	12 Dokumen	1 Dokumen	211.911.524,00	2 Dokumen	211.915.656,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	24 Dokumen	1 Dokumen	328.375.266,00	4 Dokumen	328.380.247,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	203.191.290,00	1 Dokumen	203.240.094,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	549.246.876,00	1 Dokumen	549.250.216,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	6 Laporan	1 Laporan	709.988.633,00	1 Laporan	710.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	90 %	85 %	32.668.427.040,00	90 %	24.331.284.652,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	6 Laporan	1 Laporan	32.668.427.040,00	1 Laporan	24.331.284.652,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	90 %	80 %	367.169.766,00	85 %	367.170.869,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	30 Orang	367.169.766,00	25 Orang	367.170.869,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik Presentase Aset yang termanfaatkan Presentase Aset yang sudah dinilai Presentase penghapusan aset</i>	91 % 70 % 90 % 90 % 89 % 92 %	69 % 88 % 89 % 90 %	26.912.362.546,00	91 % 70 % 90 % 90 % 89 % 92 %	13.359.209.503,00	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	90 %	85 %	26.912.362.546,00	90 %	13.359.209.503,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	24 Dokumen	4 Dokumen	1.610.106.160,00	4 Dokumen	1.610.456.488,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	2 Dokumen	18.168.552.035,00	1 Dokumen	6.754.041.704,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	2 Dokumen	372.747.880,00	1 Dokumen	372.752.580,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	370.009.745,00	1 Laporan	370.029.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Inventarisasi Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	1.629.440.180,00	1 Laporan	1.629.999.535,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025		TARGET 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	431.576.200,00	1 Laporan	431.577.073,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	353.983.817,00	1 Laporan	353.984.947,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	1 Dokumen	2.489.647.800,00	1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	6 Laporan	1 Laporan	538.116.384,00	1 Laporan	538.162.075,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	12 Laporan	1 Laporan	215.528.203,00	2 Laporan	215.529.339,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	25 Orang	732.654.142,00	25 Orang	732.676.242,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				113.665.747.427,00		94.235.998.487,00	

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPD BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2021.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu,



YOHANES ANDY ABEL S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730702 199403 1 006